

Airlangga Sambungan hal 2

Pada kesempatan itu, Hasto mengatakan, kabar pengunduran diri Airlangga Hartarto tersebut telah dilaporkan kepada KetumPDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. "Hal tersebut sangat mengejutkan, karena ini dalam rangka pilkada serentak dan muncul kejadian politik yang dalam kategori kami suatu hal yang luar biasa yang menyentuh aspek kedaulatan partai," tegasnya.

Menurutnya, Airlangga merupakan sosok komunikator maupun rekan yang membangun kerja sama politik yang baik. "Di dalam pilkada, kami banyak bekerja sama dengan Partai Golkar, selain dengan partai yang lain seperti Gerindra, PKB, PPP, Perindo, Hanura dan juga Partai Amanat Nasional," ujarnya.

Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono menegaskan, Airlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai ketua partai bukan karena ada tekanan dari internal partai. Agung menyebut, keputusan Airlangga itu, murni keputusan pribadi.

Agung juga menyebut, keputusan Airlangga mundur tidak dibahas atau didiskusikan terlebih dulu di internal partai, termasuk ke kalangan politikus senior Partai Golkar sebelum menetapkan sikapnya itu. (Ant/Obi)-f

Bank Sambungan hal 2

"Data di bulan Juli, kami mencatat tingginya animo terhadap tabungan Simpeda," tegas Agus.

Kegiatan tersebut juga dirangkai 'Jogja Class Meeting #2' yang merupakan gelaran tahunan Bank BPD DIY untuk memperingati Hari Indonesia

Menabung pada 20 Agustus. Acara ini merupakan ajang pertemuan ratusan siswa di DIY dalam beberapa kompetisi. Diselenggarakan pula talkshow dengan tema menarik seputar inklusi dan digitalisasi keuangan.

Pengundian juga dihadiri

Sekda DIY Benny Suharsono, Direktur Umum Bank BPD DIY Hudan Mulyawan, Direktur Kepatuhan Bank BPD DIY Dian Ari Ani, Deputy Kepala Perwakilan BI DIY Hermanto, Kepala OJK DIY Eko Yunianto serta sejumlah pejabat di DIY. (Sal)-f

DPS Sambungan hal 2

Sehingga jangan sampai warga yang sudah tidak berhak menjadi pemilih, masuk dalam DPT. Sebaliknya, warga yang sudah memiliki hak pilih justru tidak masuk DPT yang bakal ditetapkan bulan depan.

Zuhad menambahkan, dari 321.273 pemilih dalam DPS, terdiri dari 153.797 pemilih laki-laki, dan 167.476 pemilih perempuan. "Jumlah pemilih dari kaum perempuan baik saat Pemilu maupun Pilkada kecenderungannya memang lebih tinggi dibanding laki-laki. Tetapi bagaimanapun jumlah pemilih sifatnya masih dinamis karena sewaktu-waktu ada hal yang bisa berakibat pada perubahan data," ungkapnya.

Selain menetapkan DPS untuk Pilkada Kota Yogya, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga turut ditetapkan. Jumlah TPS untuk

mengakomodir pemilihan pada 27 November 2024 mendatang mencapai 651 TPS, sudah termasuk dua TPS khusus yang didirikan di lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan (rutan). Dibanding Pemilu 2024, kebutuhan TPS untuk gelaran Pilkada di setiap daerah mengalami penurunan hingga separuh. Hal ini karena, selain Pilkada lebih simpel lantaran hanya berisi satu jenis surat suara, jumlah pemilih yang diakomodir di tiap TPS juga jauh lebih tinggi dibandingkan Pemilu.

"Kalau dulu untuk Pemilu itu kan setiap TPS bisa mengakomodir maksimal 300 pemilih. Sedangkan pada gelaran Pilkada nanti tiap TPS maksimal bisa mencapai 600 pemilih. Ini yang menyebabkan jumlah TPS juga berkurang," tandasnya. (Dhi)-f

Pemda Sambungan hal 2

pemberian izin pemanfaatan TKD itu kalurahan harus lebih dulu menyampaikan permohonan kepada Bupati/Walikota untuk penggunaan TKD. Selanjutnya izin itu akan diteruskan ke Gubernur DIY melalui Dispertaru DIY dan akan disampaikan kembali ke Kasultanan

Yogya," ujarnya.

Apabila kasultanan sudah memberikan izin persetujuan, akan dinaikkan ke Gubernur lewat biro hukum. Seandainya karena sesuatu hal tidak disetujui akan kami kembalikan lagi ke Bupati/Walikota. (Ria)-f

Data Sambungan hal 2

jabatan, instansi, alamat, nomor identitas, nomor HP, surel (email), pendidikan, jurusan, dan tahun lulus.

"Selain data tersebut, masih banyak lagi data lainnya, baik yang berupa cleartext (informasi yang disimpan atau dikirim dalam bentuk yang tidak terenkripsi) maupun text yang sudah diproses dengan metode kriptografi. Peretas mengklaim mendapatkan data dari BKN sejumlah 4.759.218 baris yang berisi data, di antaranya nama, tempat lahir, tanggal lahir, gelar, tanggal CPNS, tanggal PNS, NIP, nomor SK CPNS, dan nomor SK PNS," ungkapnya.

Pada postingan tersebut, lanjut Pratama, peretas yang sudah bergabung dalam forum yang biasa untuk jual beli hasil peretasan tersebut menawarkan seluruh data tersebut sebesar 10.000 dolar Amerika Serikat (sekitar Rp 160 juta). Peretas juga membagikan sampel data berisi 128 ASN yang berasal dari berbagai instansi di Aceh.

Mengenai hal ini, CISSReC sudah melakukan verifikasi secara random terhadap 13 ASN yang namanya tercantum dalam sampel data tersebut melalui WhatsApp. "Menurut mereka data tersebut adalah valid meskipun ada

yang menginformasikan tentang adanya kesalahan penulisan digit terakhir pada field NIP dan NIK," kata pakar keamanan siber ini.

Hingga Minggu pagi, kata dia, belum ada konfirmasi secara resmi, baik dari pihak BKN maupun pihak terkait seperti BSSN dan Kominfo atas dugaan kebocoran data ini. BKN sudah melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan BSSN un-

tuk memperkuat data ASN dan meningkatkan kualitas perlindungan informasi dan transaksi elektronik pada tanggal 3 Oktober 2022. Namun, kata Pratama, MoU ini hanya berlaku selama 1 tahun dan berakhir pada bulan Oktober 2023. "Belum diketahui apakah BKN memperpanjang MoU dengan BSSN tersebut atau tidak?" kata dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) PTIK ini. (Ant/Has)-f

Melangkah Sambungan hal 1

paten/kota.

"Perayaan ini bukan hanya sebuah acara seremonial semata, melainkan sebuah perwujudan dari rasa bangga dan cinta terhadap budaya serta identitas lokal," kata TriAgus.

Beragam kegiatan yang diadakan mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah turun-temurun. Dari pameran yang dilaksanakan selama 30 hari di Hotel Mutiara, Gelar Budaya Jogja yang dilakukan se-Kapanewon DIY, Peringatan Hari Aksara Nasional, SiBakul Sport Fest, hingga Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (Fordasi) 2024, semuanya dirancang untuk menegas-

kan dan merayakan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Keistimewaan DIY.

Diharapkan, Pembukaan Rangkaian Peringatan 12 Tahun Undang-undang Keistimewaan DIY ini mampu memberikan manfaat bagi segenap lapisan masyarakat.

Acara Pembukaan Rangkaian 12 Tahun Undang-undang Keistimewaan DIY dimeriahkan 'Gebyar Musik Istimewa' menampilkan Woro Widowati bersama Orkes Keroncong Tresnowara, Srawung Krumpyung, Dagelan Mataram RT RW, Wayang Hip Hop, dan Icipili Mitirimin 'Omah Cangkem'. (Wan/Dev)

Dekarbonisasi Sambungan hal 2

regulasi yang mendorong transportasi publik, pengurangan penggunaan bahan bakar fosil dalam penyelenggaraan transportasi darat, dan ketersediaan infrastruktur transportasi publik.

Penghasil emisi karbon, berdasarkan tipe kendaraan di transportasi darat, adalah mobil: 48% dan bus: 6%. Emisi yang dihasilkan untuk mengangkut 40 orang dengan bus medium adalah 66 kg/100 km, sementara mobil (asumsi 4 penumpang) menghasilkan 269 kg/100 km. Penggunaan mobil pribadi menghasilkan emisi 4 kali lipat dibandingkan dengan bus. Penyediaan transportasi publik adalah usaha dekarbonisasi.

Penggunaan energi bersih yang menggantikan fosil didorong dengan Perpres 55 tahun 2019: Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Battery untuk Transportasi Jalan, yang memberikan insentif fiskal dan non fiskal. Biaya investasi kendaraan listrik yang lebih mahal daripada kendaraan berbahan bakar fosil menjadi kendala dalam percepatan penggunaan kendaraan Listrik. Usaha creative financing dengan menggabungkan sumber pembiayaan dari pemerintah, swasta, dan dana filantropi berjalan di Indonesia.

Jalur dan route yang tepat, halte yang nyaman dan terjangkau mendorong perpindahan penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik.

Transportasi public yang tepat waktu karena infrastruktur yang reliable pada akhirnya akan mengurangi emisi karbon.

Kualitas udara Jogja di Juli 2024 menunjukan Air Quality Index (AQI) yang sedang (rata-rata 63), kejadian AQI lebih dari 100 terjadi hanya 1 hari. Kualitas udara di Yogya tidak semengkhawatirkan Jakarta dan aglomerasinya.

Kawasan sumbu filosofi yang sudah ditetapkan sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO, memerlukan usaha untuk mempertahankan situs sepanjang sumbu filosofi. Tingkat emisi udara menjadi pemicu ketidaklestarian situs budaya tersebut.

Dinas Perhubungan DIY merencanakan Kawasan Malioboro sebagai full pedestrian di tahun 2025 serta mendorong penggunaan Trans Jogja bagi wisatawan menikmati Malioboro.

Trans Jogja sebagai angkutan umum perkotaan bersubsidi dengan sistem Buy the Service adalah bentuk keberpihakan Pemda DIY untuk keberlanjutan, karena terbukti menjadi penerun emisi karbon.

Anggaran subsidi sebesar Rp 80 miliar di tahun 2023, atau 1,5% APBD DIY menunjukkan keberpihakan Pemda DIY.

Delapan belas route melewati Kota Yogya, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul melayani rata-rata 330 ribu penumpang/bulan, yang setara dengan penggunaan 2.750 mobil pribadi/hari. Inisiatif elektrifikasi armada dimulai tahun 2024.

Dukungan Selanjutnya

Keberpihakan kepada transportasi publik sebagai urusan wajib pemerintah hendaknya dilanjutkan. Kritik kinerja Trans Jogja adalah cambuk perbaikan, bukan menghilangkan layanan. Dukungan dari key opinion leader dalam operasional Trans Jogja menjadi pengungkit lain.

Gerakan Green Friday di Dinas Perhubungan DIY dan Rehat (Rabu Sehat) di PT Anindya Mitra Internasional, untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor pribadi di hari tertentu, perlu diamplifikasi oleh Pemda DIY.

Keberadaan kawasan bebas kendaraan pribadi, dapat diterapkan di lingkungan kampus dan sekolah. Trans Jogja akan menjadi pilihan mahasiswa dan pelajar dalam memenuhi kebutuhan mobilitasnya. Pengelola Trans Jogja wajib untuk membenahi layanannya, sehingga mampu menjawab keberpihakan kampus dan sekolah. Yogya makin berkurang emisinya. (Penulis adalah Direktur Utama PT IPU Anindya Mitra Internasional, Pengelola Trans Jogja)-f

BRI PERKUAT BENTENG DIGITAL
Keamanan Data dan Dana Nasabah Jadi Prioritas Utama



KR - Istimewa

Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Arg M. Nugraha

JAKARTA (KR) - Meningkatnya ancaman siber mendorong PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk terus memperkuat cyber security infrastruktur digital yang dimilikinya. Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Arg M. Nugraha, mengungkapkan bahwa perusahaan telah menerapkan berbagai langkah strategis untuk melindungi data nasabah.

"Kami menyadari pentingnya keamanan siber dalam era digital saat ini. Oleh karena itu, BRI telah membangun sistem keamanan data yang kuat. Kami mengimplementasikan strategi keamanan siber yang komprehensif untuk menjamin keamanan sistem dan data BRI dari berbagai ancaman. Ada empat langkah utama yang kami ambil untuk memastikan hal tersebut," tambahnya.

Langkah pertama yang diambil BRI adalah melakukan threat Monitoring dan Intelligence secara Proaktif. Dengan memiliki Security Operations Center yang beroperasi 24/7, BRI mampu memonitor ancaman-ancaman yang muncul secara real-time. BRI juga bekerja sama dengan security researchers dan institusi infosec yang bonafid dan profesional. Selanjutnya, BRI rutin melakukan Security Audits dan Assessments, dimana setiap pengembangan produk digital telah melalui proses keamanan yang ketat.

"Di sisi lain, BRI juga aktif menjalankan Program Awareness dan Pelatihan secara reguler. BRI



KR - Istimewa

BRI berkomitmen untuk terus meningkatkan ketahanan siber dan waspada terhadap ancaman yang terus berkembang.



KR - Istimewa

BRI memiliki Incident Response dan Recovery Planning melalui tim CSIRT yang telah dilengkapi dengan peralatan dan pengetahuan yang memadai



Muhammad Zuhdan, SIP MA
Kaprodi Ilmu Pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta

KITA masih ingat semua, ketika istilah "Kerja, Kerja, Kerja" menjadi narasi politik nasional yang selalu digemborkan oleh pemimpin pemerintahan negeri ini selama 10 tahun ini. Kata-

Ketika "Kerja" Dijadikan Narasi Politik Populisme di Era Pasca Kebenaran

kata tersebut seolah-olah menunjukan bahwa "kerja" bukan lagi sebuah kata ideologis tetapi sudah menjadi narasi politik populisme. Kerja bukan lagi dalam bingkai politik sosialisme ataupun kapitalisme yang menunjukan bahwa kerja adalah kebutuhan dasar manusia dalam memenuhi hayatnya. Negara-negara sosialisme ataupun kapitalisme, melihat kerja adalah kata politik yang sakral karena menyangkut nasib dan perasaan manusia di era industri.

Kerja adalah bentuk pembebasan manusia dari keterasingan, kalau kerja menjadi bentuk perbudakan antar umat manusia, itulah yang ditentang oleh

peradaban manusia. Hal ini menjadi perdebatan di Eropa ketika kerja bukan lagi menjadi bentuk hayati manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Revolusi Industri di Inggris adalah salah satu puncak sejarah dimana manusia mulai sadar bahwa hubungan antara manusia dengan dunia kerja perlu didefinisikan ulang. Sebelum ada Revolusi industri Inggris, masyarakat Eropa mengalami keterasingan dalam hidupnya karena hampir seluruh waktu hidupnya untuk bekerja di dalam pabrik.

Hampir 300 tahun Revolusi Industri Inggris tersebut mulai lenyap dan dilupakan oleh umat manusia. Kerja bukan lagi

dilihat hubungannya dengan manusia, tetapi dengan capaian kapital. Istilah-istilah turunan baru dari kata kerja ini muncul, seolah kata-kata tersebut adalah kata-kata emas bentuk kesuksesan umat manusia. Kata-kata tersebut misalnya produktivitas, disiplin, kemajuan, pembangunan, kesuksesan, keberhasilan, prestasi dan lain-lain. Kata-kata tersebut menjadi istilah yang selalu dijadikan ukuran dalam melihat kemajuan individu, perusahaan, ataupun lembaga. Hal ini juga dilembagakan oleh lembaga-lembaga konsultan yang masih punya perspektif klasik dalam melihat dan mengukur keberhasilan seorang manusia, sebuah perusahaan, sebuah

lembaga non pemerintah, bahkan sebuah negara sekalipun.

Para ilmuwan sosial dan politik, nampaknya juga ikut hanyut dan tidak mampu melihat bahwa hal tersebut masalah besar yang akan menghancurkan peradaban manusia. Para ilmuwan sosial dan politik juga hanyut dalam narasi yang mengglorifikasikan kata "kerja". Walaupun banyak ilmuwan sosial dan politik yang beraliran behaviorisme yang masih melihat pusat kesalahan dunia terletak di "manusianya/individu" atas terjadinya beragam masalah di dunia ini, tetapi setidaknya para "The Last Mohican" ilmuwan sosial dan politik yang masih tersisa berani untuk

mengungkapkan gagasan politiknya dalam menjawab keterbelokan arah dan ideologi dari kata "kerja" tersebut.

Salah satu fenomena sosial politik di Indonesia, yaitu ketika kata "kerja" dijadikan jargon politik populisme oleh penguasa negeri ini. Jika kata "kerja" diletakan sebagai politik populisme tentu hanya akan membuat "kerja" adalah bentuk pencitraan di mata rakyat. Di era digital yang ditambah dengan era pasca kebenaran ini, kata kerja yang awalnya sakral akan rentan dijadikan alat pencitraan.

Hampir semua pejabat pemerintah hari ini memiliki media sosial yang hampir sebagaian besar ingin



menunjukan bahwa mereka telah "bekerja". Kalau itu bagian dari komunikasi politik, boleh-boleh saja, tetapi yang patut dikembalikan maknanya bahwa kerja bukanlah untuk mengejar citra politik, tetapi lebih sebagai mandat rakyat di pundak pejabat pemerintahan, dan itu adalah bussiness as usual, yang artinya sudah sewajarnya anda melakukan itu karena memang itu sudah tugas harian anda. Mengembalikan kata "kerja" bukan hanya sebagai citra politik tapi ini mengenai hayat hidup orang banyak adalah hal yang penting agar politik kita kembali ke arah politik kesejahteraan.